# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA KERANGKA BERFIKIR DAN PROPOSISI

**2.1 Kajian Pustaka**

Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan akibat Covid-19. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada penelitian ini dilakukan di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dengan harapan dapat membantu masyarakat terdampak Covid-19 khususnya masyarakat miskin. Keberhasilan dari kebijakan program tersebut sangat diperlukan untuk membantu masyarakat miskin di Desa Kertawangi yang terdampak Covid-19. Seperti diketahui kemiskinan merupakan permasalahan yang telah ada sejak dahulu dan belum kunjung usai sampai saat ini, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang membuat potensi kemiskinan semakin menjadi. Oleh karena itu, program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa diharapkan bisa menjadi solusi.

### 2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam laporan skripsi ini, penulis mencari referensi dari laporan skripsi terdahulu yang saling berkaitan yaitu mengenai implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa. Berikut laporan penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa :

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang oleh Endik Hidayat 2020

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Endik Hidayat pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang”, pada penelitian tersebut penulis menggunakan teori dari Edward III dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penulis berpendapat di dalam penelitian tersebut bahwa dengan adanya kebijakan dana desa yang dialokasikan untuk menangani pandemi Covid-19 sangat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan di tengah kondisi permasalahan pandemi Covid-19. Kabupaten Sampang sendiri telah melaksanakan kebijakan-kebijakan terhadap peng alokasian Dana Desa dengan baik namun belum maksimal. Penulis mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan sesuai dengan teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi.

Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang telah dilakukan dengan baik sehingga informasi yang disampaikan tidak salah, komunikasi selalu di jain baik itu dengan kepala desa yang ada di Kabupaten Sampang ataupun dengan relawan-relawan terkait penanggulangan Covid-19 itu sendiri. Namun penulis mengungkapkan bahwa Sumber Daya yang dimiliki Kabupaten Sampang dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa belum memiliki kompetensi yang baik sehingga menghambat kebijakan tersebut. Permasalahan sumber daya menjadi faktor permasalahan yang harus diselesaikan. Tapi secara keseluruhan implementasi kebijakan dana desa telah dilakukan dengan baik karena terdapat fakta-fakta yang menunjukan progress baik dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

1. Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020 oleh Teguh Imam Rahayu 2020

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan judul “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020”. Pada penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa implementasi dari kebijakan penggunaan dana desa di Desa Turitempel telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan peneliti terkait implementasi kebijakan ini melihat pada unsur *Content of Policy* dan unsur *Context of Policy* sesuai dengan teori yang penulis gunakan yaitu teori Merilee S Grindle. Dalam kontek isi kebijakan penulis mendapati bahwa masyarakat Desa Turitempel lebih menginginkan kebijakan berupa bantuan uang dibanding dengan kebijakan dengan program pemberian masker, penyemprotan disinfektan di tempat-umum dan lain-lain. Sehingga masyarakat beranggapan bantuan uang tunai lebih dirasakan manfaatnya dibanding dengan program lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Turitempel tersebut. Sedangkan dalam unsur lingkungan kebijakan Pemerintah Desa Turitempel telah menjalankan dengan baik karena didukung dengan masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah desa walaupun masih terdapat masyarakat yang acuh seperti pada sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dengan cara mengundang perwakilan masyarakat, masih terdapat masyarakat yang tidak menghadiri padahal hal tersebut sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri.

Faktor pendorong dari kebijakan dana desa diantaranya adalah peran dari RT/RW yang selalu membantu serta menuruti terhadap apa yang diperintahkan oleh Pemerintah Desa dan berdasar pada musyawarah yang dilakukan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi dating dari faktor masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap kebijakan bantuan langsung tunai dana desa, karena kebanyakan masyarakat Desa Turitempel beranggapan untuk penerima kebijakan tersebut adalah semua orang baik miskin atau kaya, padahal bantuan tersebut memiliki kriteria tersendiri terhadap target dari kebijakan tersebut.

1. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.

Pada penelitian yang ketiga ini sebagai kajian penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Refendy Paat dengan judul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif , penelitian ini berlokasi di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan Teori dari Jones. Pada penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Tokin telah dilaksanakan dengan baik namun masih ada beberapa kekurangan. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dinilai oleh penulis berdasarkan Teori dari Jones yaitu dalam aspek Organisasi penulis berpendapat bahwa Desa Tokin telah melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan mekanisme yang diterapkan, kemudian pada tingkat interpretasi atau tingkat pemahaman pelaksana kebijakan pun telah baik namun hanya terkendala pada informasi yang beredar di masyarakat sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap masyarakat dan pemerintah Desa Tokin. Dan dalam aspek aplikasi di lapangan pun pemerintah Desa Tokin telah melaksanakan kebijakan bantuan langsung tunai tersebut dengan baik dan tepat sasaran karena masyarakat yang diwawancarai dan bukti dari masyarakat lain pun memperkuat bahwa pemerintah Desa Tokin telah baik dalam pembagian dari Bantuan Langsung Tunai tersebut.

**Tabel: 2.1.1**

**Kajian Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | NamaPeneliti | JudulPenelitian | Persamaan dan Perbedaan |
| Teori Yang Digunakan | Pendekatan | Metode | Teknik Analisis |
| 1 | Endik Hidayat 2020 | Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang | Edward III | Kualitatif | Deskriptif | Observasi,Wawancara, Dokumenntasi |
| 2 | Teguh Imam Rahayu, Ali Gufron 2020 | Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020 | Marilee S Grindle | Kualitatif | Deskriptif | Observasi, Wawancara, Dokumentasi |
| 3 | Refendy Paat,Sofia PangemananFrans Singkoh 2020 | Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan | Jones | Kualitatif | Deskriptif | Observasi,Wawancara,Dokumentasi |

### 2.1.2 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan dua orang atau lebih dalam melakukan kegiatan administrasi meliputi catat mencatat, surat-menyurat, pengelolaan arsip, tulis menulis, pengolahan data dan lain-lain guna mencapai tujuan bersama.

Administrasi secara arti luas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan rencana yang telah di buat di awal dan sesuai dengan melakukan tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan dengan harapan pencapaian tujuan akan lebih efektif dan efisien.

Adapun pengertian administrasi menurut **Siagian (2008)**, Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Administrasi merupakan kegiatan yang mengutamakan kerjasama karena dalam administrasi kerjasama merupakan faktor penting guna mencapai tujuan bisa lebih efektif dan efisien

Menurut **George Terry** administrasi merupakan pengendalian dan peng-organisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada pengertian tersebut, administrasi merupakan proses kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan beupa pengendalian dan peng-organisasian kerja dengan harapan hasil yang didapatkan dalam penerapannya merupakan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

 Adapun pengertian administrasi menurut **Prajudi Atmosudirjo (1982:272)** dalam buku Administrasi dan Manajemen Umum mengatakan Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Definisi menurut Prajudi Atmosudirjo di atas lebih menekankan administrasi pada aspek kenegaraan yang dimana administrasi dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan tersebut bersifat kenegaraan. Namun pada hakikatnya administrasi dapat fleksibel dan diterapkan dimana saja baik itu di pemerintahan atau Negara, swasta, bahkan di kehidupan sehari-hari.

Adapun pengertian Administrasi menurut (**Syafri 2012: 5)** dalam pengertian Administrasi terkandung hal-hal berikut.

a. Kelompok orang (manusia), yakni berkumpulnya dua orang atau lebih dalam suatu perkumpulan (organisasi), organisasi sipil, atau militer, negeri atau swasta, organisasi besar atau kecil.

b. Kegiatan, yakni berupa sejumlah aktivitas yang harus dikerjakan baik secara individual, namun masih terkait dengan kegiatan orang lain, ataupun bersama-sama mencapai tujuan yang ingin dicapai.

c. Kerjasama, yakni antar individu dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat diselesaikan atau dituntaskan seorang diri.

d. Tujuan, yakni sesuatu yang ingin didapatkan atau dicapai oleh kelompok orang yang bekerjasama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang tidak bisa diraih seorang diri.

e. Efisiensi, yakni perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output)

Secara umum administrasi merupakan sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang dimana di dalam proses usaha tersebut dibutuhkan sosok pemimpin serta staf yang memiliki kemampuan di masing-masing tugas yang diberikan serta saling menjalin komunikasi agar tujuan yang menjadi fokus dapat tercapai dengan baik.

Seperti yang diungkapkan **Ordway Tead (1953)** administrasi merupakan usaha yang luas mencakup segala bidang untuk memimpin, mengusahakan, mengatur kerjasama kegiatan manusia yang ditujukan pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu.

Kegiatan administrasi terjadi pada satu wadah yang dinamakan organisasi. Organisasi adalah satu kesatuan yang merupakan wadah tempat berlangsungnya kegiatan administrasi dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Berikut ciri-ciri organisasi menurut Farland yang dikutip oleh Handayaningrat (1985 : 43), sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal

2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan

3. Tiap – tiap anggota memberikan sumbangan usaha nya / tenaga nya

4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan

5. Adanya suatu tujuan

Kegiatan administrasi dirasa berhasil apabila seluruh elemen yang terkait bisa saling bekerjasama dan saling melakukan tugas sesuai peng-organisasian tugas yang telah dibuat serta fokus pada tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi Publik merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam ruang lingkup Negara dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat atau publik.

Menurut **David Rosenbloom** Administrasi public merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Administrasi publik pada hakekatnya dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan untuk menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu sendiri.

Adapun pengertian administrasi publik menurut **Dwight Waldo (1955)** administrasi publik merupakan manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Dari pengertian tersebut administrasi dilakukan oleh sekelompok manusia dengan dukungan peralatan yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat luas atau publik, administrasi public tersebut dilakukan dalam ruang lingkup Negara atau pemerintahan suatu Negara.

Adapun pengertian Administrasi Publik menurut **Edward H. Litchfield** **(1956:1)** dalam bukunya *Notes on a General Theory of Administration* berpendapat bahwa administrasi Publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Menurut **Siagian** dalam bukunya **Filsafat Administrasi (2008:7)** administrasi negara merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Berdasarkan pengertian tersebut administrasi publik merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan suatu Negara dengan program-program atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan. Aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam administrasi public agar pencapaian tujuan dapat tercapai sesuai dengan rencana secara efektif dan efesien.

### 2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kajian dalam ilmu politik yang sangat menarik untuk dikaji. Kebijakan publik terdiri atas dua kata yaitu Kebijakan dan Publik, yang dimana kedua kata itu memiliki makna masing-masing.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep yang menjadi dasar suatu perencanaan yang menghasilkan suatu ketetapan berupa program, peraturan atau sesuatu yang harus dikerjakan dan ditaati. Kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan dari suatu permasalahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang dicapai dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kebijakan merupakan suatu bentuk ucapan atau tulisan yang diputuskan secara matang oleh pemimpin dan tentunya telah memikirkan manfaat serta resiko dari apa yang diputuskan. Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu keputusan-keputusan penting organisasi untuk diimplementasikan di ruang lingkup publik atau masyarakat. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep untuk menjadi patokan suatu pekerjaan, program, kepemimpinan, dan cara bertindak agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan

Menurut **James E. Anderson**, mendefinisikan bahwa Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variable karena dalam pembuatan kebijakan public sangatlah kompleks. Berikut tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34 adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Tahap ini merupakan tahap dimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di kumpulkan di pilih yang paling mendesak untuk di buat suatu kebijakan. Yang dimana di tahap ini merupakan tahap yang menentukan kebijakan apakah tepat sasaran atau tidak.

1. Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap ini merupakan tahap untuk menyusun strategi atau formula setelah beberapa agenda permasalahan telah sepakat di ambil dan akan dijadikan kebijakan. Pada tahap ini para pembuat kebijakan mulai mengatur sedemikian rupa solusi atas permasalahan yang terjadi sesuai agenda yang di pilih. Pada tahap ini pula diperhitungkan strategi terbaik untuk kebijakan yang akan dikeluarkan

1. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dan siap untuk diimplementasikan.

1. Tahap implementasi kebijakan.

Tahap implementasi merupakan tahap di mana kebijakan telah siap dan diberlakukan untuk publik agar mentaati guna memecahkan masalah. Pada tahap ini kebijakan akan terus dipantau kinerjanya di publik agar dapat di evaluasi pada tahap terakhir yaitu tahap evaluasi kebijakan.

1. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Dalam konteks administrasi Negara atau publik memang kata kebijakan tidak terlepas dari kata publik, dalam ilmu administrasi Negara jika berbicara perihal kebijakan maka harus berdampak untuk orang banyak bukan perorangan.

Publik merupakan sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang saling memiliki kepentingan masing-masing dan kepentingan sosial serta saling menjalin komunikasi terhadap satu sama lain.

Menurut **Djaja (1985)**,mendefinisikan bahwa Publik adalah sekelompok individu yang terikat satu permasalahan, kemudian timbul perbedaan pendapat terhadap masalah tadi dan berusaha untuk menanggulangi persoalan tadi dengan jalan diskusi sebagai jalan keluarnya.

Maka Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang ditujukan kepada sekelompok orang dengan tujuan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Kebijakan publik dapat berbentuk program-program untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ruang lingkup masyarakat agar menjadi solusi bagi masyarakat itu sendiri.

Menurut **Chandler dan Plano (2003)**,Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Suatu kebijakan yang berkualitas memang lahir dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas pula, karena dengan sumber daya yang berkualitas akan mampu menganalisis apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut akan sangat membantu masyarakat.

Menurut Chandler dan Plano (1988:107) dalam Kamus Administrasi Publik, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Definisi tersebut menekankan bahwa manfaat dari sumberdaya begitu penting untuk mencapai tujuan suatu kebijakan publik yang dimana sumberdaya yang dimiliki harus mempunyai kualitas yang baik sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi, demi tercapainya kepentingan public yang di inginkan.

Definisi kebijakan publik menurut **Thomas R Dye (2009)**, sebagai berikut Kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Menurut **Solichin Abdul Wahab (2008: 40-5)** ada beberapa pedoman untuk kebijakan itu sendiri, sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli yang penulis kutip dapat disimpulkan bahwa kebijakan public adalah kebijakan yang di buat dan ditetapkan oleh pemerintah yang di peruntukan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di tengah kelompok orang dan dibuat untuk dijalankan dan ditaati guna menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

### 2.1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat yang dimana kebijakan tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Implementasi kebijakan publik pada dasarnya adalah cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam bentuk program dari pemerintah kepada masyarakat, pemerintah selaku penyelenggara kebijakan tentunya harus didukung partisipasi masyarakat agar implementasi kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai pada tujuan yang diharapkan.

Adapun pendapat mengenai implementasi menurut **Horn (Tahir, 2014:55)**, mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Selanjutnya pendapat Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah sebagai berikut :

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

 Keberhasilan dari implementasi menurut Purwanto (Syahida,2014:13) memiliki beberapa faktor , beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.

2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).

4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).

5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)

6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Adapun Menurut Meter dan Carl (Pratama, 2013:230), menjelaskan bahwa pengertian dari implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan terdiri atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh implementor sebagai pelaku dari kebijakan dan diharapkan dapat mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal serta dapat membawa dampak positif untuk masyarakat sehingga permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat teratasi dengan baik.

Menurut **Mulyadi (2015:26),** implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multi organisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Adapun tujuan dari implementasi kebijakan menurut Wibawa (Tahir, 2014:58) sebagai berikut:

“Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.”

Sedangkan implementasi kebijakan menurut **Jones (Waluyo, 2007:50)** sebagai berikut “Dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

1) Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain.

2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi”.

Implementasi kebijakan menurut **Hamdi (2014:97)** Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.

Pada implementasi kebijakan, pelaksanaan merupakan langkah awal yang sangat penting guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan akan berhasil dan berkualitas apabila pelaksanaan yang dijalankan dilakukan dengan baik dan sesuai dari tujuan kebijakan itu sendiri, sehingga manfaat dari kebijakan itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan, karena partisipasi masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap kebijakan tersebut dan dapat menjadi tolak ukur kebijakan tersebut berhasil atau belum berhasil.

Menurut **Merilee S. Grindle (2005)** Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan *(content of policy)* dan lingkungan implementasi *(context of implementation).*

Dua variable besar yang dimaksud diatas yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Berikut uraian dua variabel yang di maksud Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2005) :

1. Isi Kebijakan
* Kepentingan kelompok
* Tipe Manfaat
* Derajat perubahan yang diinginkan
* Letak pengambilan
* Pelaksanaan program
* Sumberdaya yang di dapat
1. Lingkungan Implementasi
* Kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaku
* Karakteristik lembaga
* Kepatuhan daya tanggap

Selanjutnya menurut **Huntington (Mulyadi, 2015:24),** perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu dari kualitas kebijakan itu sendiri ataupun aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan sumber daya manusia yang dimiliki harus berkualitas dan peralatan atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki harus mendukung, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan baik dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut **Lester dan Stewart (Nastia 2014:201)** bahwa implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil *(output)* keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir *(output)* yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.

Tercapai atau tidaknya suatu tujuan dalam implementasi kebijakan tentunya ditentukan oleh implementor yang menjalankan kebijakan tersebut, implementor harus memiliki kompetensi yang baik dan haru bekerja sesuai tugasnya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Adapun pendapat menurut **George C. Edward III (dalam Subarsono 2011)** Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan proses penyampaian suatu informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang dimana peran implementor sangat penting ketika penyampaian informasi baik itu antar implementor ataupun dengan masyarakat itu sendiri agar menghindari adanya salah komunikasi.
2. Sumberdaya, merupakan hal penting bagi implementasi suatu kebijakan karena sumberdaya dapat menunjang keberhasilan suatu kebijakan, sumberdaya dapat berupa implementor sebagai pelaku dari implementasi kebijakan ataupun fasilitas yang dimiliki. Kualitas sumberdaya yang dimiliki dapat menentukan pula keberhasilan dari suatu kebijakan, sumberdaya yang memiliki kompetensi baik maka implementasi kebijakan pun akan berjalan dengan baik begitupun sebaliknya.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan publik karena dengan adanya struktur birokrasi maka pembagian kerja implementor dalam menjalankan implementasi kebijakan akan lebih jelas. Struktur birokrasi dibuat dengan harapan agar proses kerja yang dilakukan dapat berjalan lebih efektif serta dapat menunjang implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan sesuai rencana dan sesuai dengan peraturan dari birokrasi itu sendiri.

## 2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan pola pemikiran penulis atau alur berfikir penulis dalam menyusun penelitian sesuai dengan konsep dan tema, dan ber-landasan pada teori ahli sebagai rujukan untuk mempernudah dan memahami beberapa variabel yang di gunakan penulis dalam skripsi ini. Seperti yang dikemukakan oleh **Uma Sekaran (1992)**, kerangka berfikir adalah gambaran yang menjelaskan secara kosentual antara teori dalam penelitian dan identifiaksi atas beragam permasalahan yang menjadi rumusan mengapa pentingnya riset tersebut dijalankan dan diselesaikan.

Berkenaan dengan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang dilaksanakan oleh Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yaitu permasalahan masyarakat miskin akibat terdampak Covid-19. Kebijakan program tersebut direalisasikan berdasarkan salah satu misi dari pemerintah Desa Kertawangi yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menggali potensi sumber daya alam guna dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa yang dilaksanakan oleh Desa Kertawangi tentunya merujuk pada variabel-variabel yang telah dihimpun, guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut salah satunya adalah untuk mengatasi permasalahan masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19. Yang dimana kebijakan tersebut telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang belum maksimal, seperti belum tepatnya sasaran dari penerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui keberhasilan terhadap Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat ini perlu dilakukan penelitian secara mendalam, oleh karena itu peneliti memutuskan untuk menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut George Edward III implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu sebagai berikut

1. Komunikasi, merupakan suatu proses penyampaian informasi mengenai kebijakan yang sedang diimplementasikan. Komunikasi merupakan salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan karena komunikasi sangat menentukan keberhasilan tercapainya tujuan dari suatu kebijakan. Informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi pun sangat penting agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dalam proses implementasi kebijakan agar tercipta komunikasi yang efektif. Menurut George C. Edward dalam Agustino (2006) untuk mengukur keberhasilan suatu komunikasi terdapat 3 indikator penting yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi dari komunikasi itu sendiri
2. Sumberdaya, merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan karena kepemilikan sumberdaya dapat membuat implementasi kebijakan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, adapun menurut George C. Edward III dalam Agustiono (2006) terdapat 4 indikator untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, 4 indikator tersebut yaitu staff, informasi, wewenang dan fasilitas
3. Disposisi, merupakan kecenderungan sikap implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan. Implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksana atau implementor memiliki sikap baik dan mendukung terhadap kebijakan yang dijalankan maka kebijakan akan berjalan sesuai keputusan dan rencana awal. Begitupun sebaliknya apabila sikap pelaksana cenderung negatif maka akan berakibat buruk bagi kebijakan. Menurut Edward III yang mempengaruhi variabel disposisi itu sendiri adalah dalam aspek pengangkatan birokrasi dan insentif.
4. Struktur Birokrasi, dalam implementasi kebijakan menuntut adanya kerjasama maka struktur birokrasi sangat diperlukan agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, apabila struktur organisasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka akan menimbulkan permasalahan dan berakibat implementasi kebijakan tersebut tidak efektif dan terhambat.

Setelah proses kegiatan yang dilakukan berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka dapat diketahui bagaimana pelaksanaan dari Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Maka alur kerangka berfikir yang diterapkan oleh penulis berlandaskan pada teori George C Edward III sebagai pedoman dalam membuat kerangka berfikir pada penelitian ini:

**Gambar 2.2 Kerangka Berfikir**

****

**Sumber : George C. Edward III (dalam Widodo 2011)**

**2.3 Proposisi**

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, penulis membuat proposisi berdasarkan peng-implementasian kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kertawangi. Maka penulis dalam penelitian ini membuat proposisi berdasarkan pada rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

2. Terdapat faktor-faktor yang menghambat imlpementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

3. Terdapat solusi yang dilakukan pemerintah Desa Kertawangi dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung.Barat.

#